

MAKNA SEMIOTIKA “MELE BANNE POLANA PESSE” DALAM PILKADA SUMENEP 2024

Moh. Toyu¹

Mattoyu90@gmail.com (mattoyu@stidar.ac.id)

Abstrak

Slogan kampanye "Mele Banne Polana Pesse" (Milih Bukan Karena Uang) menjadi elemen sentral dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Sumenep 2024, merefleksikan dinamika politik lokal dan aspirasi masyarakat terhadap praktik demokrasi yang bersih. Penelitian ini bertujuan menganalisis makna semiotika slogan tersebut, tidak hanya pada tingkat denotatif, tetapi juga konotatif, serta bagaimana ia berfungsi sebagai penanda budaya dan moral dalam konteks politik uang di Indonesia. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis semiotika Roland Barthes, penelitian ini mengkaji teks slogan, representasi visual, dan respons publik untuk mengungkap sistem tanda dan mitos yang terkandung di dalamnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa "Mele Banne Polana Pesse" melampaui sekadar seruan **anti-politik uang**; ia membentuk konstruksi identitas pemilih yang berintegritas, merevitalisasi nilai-nilai kejujuran, dan menantang hegemoni transaksional dalam demokrasi elektoral. Slogan ini berfungsi sebagai agen kontra-hegemoni yang berusaha menggeser narasi materialistik menjadi narasi etis, meskipun tantangan implementasinya masih besar di tengah praktik politik uang yang mengakar. Temuan ini berkontribusi pada pemahaman komunikasi politik lokal dan peran semiotika dalam membentuk kesadaran kritis masyarakat terhadap isu-isu krusial dalam pemilihan umum.

Kata Kunci: semiotika, Pilkada Sumenep 2024, politik uang

¹ Dosen STIDAR. Alumni UIN Sunan Kalijaga

Abstract

The campaign slogan "Mele Banne Polana Pesse" (Choose Not Because of Money) emerged as a central element in the 2024 Sumenep Regional Head Election (Pilkada) contestation, reflecting local political dynamics and the community's aspirations for clean democratic practices. This research aims to analyze the semiotic meaning of this slogan, examining not only its denotative but also its connotative levels, and how it functions as a cultural and moral signifier within the context of money politics in Indonesia. Employing a qualitative approach with Roland Barthes' semiotic analysis method, this study investigates the slogan's text, visual representations, and public responses to uncover the system of signs and myths embedded within it. The findings indicate that "Mele Banne Polana Pesse" transcends a mere anti-money politics appeal; it constructs an identity of integrated voters, revitalizes values of honesty, and challenges transactional hegemony in electoral democracy. This slogan acts as a counter-hegemonic agent, attempting to shift the materialistic narrative towards an ethical one, despite significant implementation challenges amidst entrenched money politics practices. These findings contribute to understanding local political communication and the role of semiotics in shaping critical public awareness regarding crucial issues in general elections.

Keywords: semiotics, 2024 Sumenep Pilkada, money politics.

A. PENDAHULUAN

Pesta demokrasi lokal, atau yang dikenal sebagai Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), merupakan instrumen krusial dalam arsitektur demokrasi Indonesia pasca-reformasi. Pilkada berfungsi sebagai arena vital bagi masyarakat untuk secara langsung menentukan pemimpinnya, sekaligus menjadi barometer kesehatan partisipasi politik dan akuntabilitas kepemimpinan di tingkat daerah. Proses ini diharapkan menjadi cerminan dari kedaulatan rakyat, di mana pilihan pemimpin didasarkan pada rekam jejak, visi, misi, dan kapasitas, alih-alih faktor eksternal yang mendistorsi. Namun, di balik idealisme tersebut, demokrasi Indonesia secara konsisten dihadapkan pada bayang-bayang politik uang. Fenomena ini, yang bermanifestasi dalam praktik jual beli suara, pemberian gratifikasi, atau janji-janji transaksional selama masa kampanye, telah menjadi kanker yang menggerogoti integritas proses elektoral. El-Manaf Sirozi (2008) secara tegas menyebut politik uang sebagai "senjata utama" yang secara sistematis melemahkan demokrasi, mengubahnya dari arena kedaulatan rakyat menjadi ranah transaksional. Pandangan ini diamini oleh Faqthuri (2020) yang menyoroti bagaimana praktik ini mencemari proses elektoral, serta Mujiono Hafidh Prasetyo (2020) yang menyimpulkan bahwa uang menjadi akar problematika dan kerusakan bangunan pemerintahan dan demokrasi, menghasilkan kepemimpinan yang kurang legitim dan tidak representatif. Dampak multidimensional ini tidak hanya mengikis kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi, tetapi juga melemahkan kualitas representasi politik, hingga pada akhirnya menghasilkan kepemimpinan yang tidak responsif terhadap kepentingan konstituen murni. Politik uang bukan hanya

masalah etika, melainkan ancaman struktural terhadap fondasi demokrasi substantif.

Untuk memahami mengapa praktik distorsif ini begitu persisten, kita perlu menyelami konteks lokal, khususnya di Madura dan Sumenep, di mana politik memiliki dinamika yang khas dan kompleks. Madura dikenal dengan struktur sosial yang unik, di mana peran Kiai dan Blater (jagoan lokal) memiliki pengaruh signifikan dalam kehidupan sosial-politik. Mohammad Kosim (2007) menjelaskan bahwa Kiai merupakan elite utama dengan pengaruh yang beragam berdasarkan silsilah dan kedalaman ilmu agama, sementara pengaruh Blater ditentukan oleh kekuatan fisik dan keberanian. Meskipun berada di "dunia" yang berbeda, keduanya dapat membangun "relasi" yang rumit, diwarnai harmoni dan ketegangan. Abdur Rozaki (2004) semakin memperdalam analisis ini, menggambarkan Kiai dan Blater sebagai "rezim kembar" yang memainkan peran sentral dalam politik lokal Madura, di mana kekerasan dan religiusitas dapat beririsan dengan relasi kuasa. Peran Kiai ini juga ditegaskan oleh Zainuddin Syarif (2014), yang menunjukkan bagaimana Kiai mempertahankan otoritas kepemimpinan mereka melalui dominasi tradisional dan karismatik, menggunakan simbol-simbol ketaatan yang dibingkai oleh nilai-nilai moral keagamaan untuk mempengaruhi massa.

Dinamika sosiokultural ini tercermin kuat dalam kontestasi Pilkada di Sumenep. Ainur Rohmatin (2016), dalam studinya tentang relasi informal dan formal politik PKB dalam penjurangan calon Bupati Sumenep 2015, menemukan bahwa relasi patron-klien yang kuat antara Kiai dan masyarakat/santri masih sangat dominan, di mana Kiai sebagai elit agama memiliki kekuasaan hierarkis yang memengaruhi pengambilan keputusan

politik. Hal ini sejalan dengan temuan Ahmad Fathoni Fauzan (2018) yang menunjukkan bahwa Pilkada Serentak 2015 di Desa Ambunten Timur, Sumenep, masih terkungkung dalam pusaran ikatan primordialisme dan mitos-mitos, yang menguatkan hubungan patronase. Dengan demikian, proses demokrasi elektoral di Sumenep tidak dapat dilepaskan dari pengaruh kekuatan-kekuatan informal dan ikatan sosial budaya yang kuat, menciptakan lahan subur bagi praktik politik uang untuk menyusup dan mengakar.

Dalam lanskap politik yang sarat pengaruh Kiai dan Blater, serta ikatan primordialisme, praktik politik uang menemukan celah untuk tumbuh subur. Christy Messy Lampus et al. (2022), dalam studinya di Manado, menunjukkan bahwa pemberian politik uang dalam bentuk sembako dinilai wajar oleh tim sukses, dan masyarakat cenderung menerima karena keterbatasan ekonomi. Fenomena serupa sangat mungkin terjadi di Sumenep, di mana Romario Christian Falco Kuntag et al. (2022) menemukan bahwa pemilihan umum tidak dapat dipisahkan dari politik uang dengan pembagian uang tunai, sembako, dan sumbangan yang menysar masyarakat kelas bawah. Bahkan, Ardhie Raditya (2011) mengindikasikan bagaimana "Jagoan Madura" (Blater) cerdas dalam memanfaatkan demokrasi untuk kepentingan politik, termasuk dalam Pilkada, yang bisa jadi berhubungan dengan pengelolaan "keamanan" atau pengaruh massa yang dapat beririsan dengan politik uang.

Meskipun praktik politik uang ini seolah menjadi "normal" dan inheren dalam setiap kontestasi, Ahmad Fachri Faqi et al. (2023) menyoroti bagaimana pemilih pemula pun terkadang menganggapnya biasa, menunjukkan tantangan besar dalam membangun kesadaran kritis. Ini

menuntut pendekatan yang lebih dari sekadar regulasi hukum. Seperti yang ditekankan oleh Muhammad Hoiru Nail (2018), pencegahan politik uang tidak hanya bergantung pada instrumen hukum pidana, tetapi juga memerlukan strategi kultural yang mendalam.

Di sinilah letak urgensi dan relevansi semiotika slogan "Mele Banne Polana Pesse" (Memilih Bukan Karena Uang) dalam konteks Pilkada Sumenep 2024. Slogan ini, yang tidak sekadar berupa deretan kata, melainkan sebuah ekspresi yang sarat makna, telah menjadi episentrum diskusi dan harapan di tengah masyarakat. Kehadirannya mengindikasikan adanya perlawanan naratif terhadap budaya politik uang yang diyakini masih mengakar kuat di berbagai level kontestasi politik. Secara semiotika, melalui kacamata Roland Barthes, slogan ini melampaui makna denotatifnya. Ia berupaya membentuk mitos baru tentang pemilih yang berintegritas dan menolak transaksionalisme. Dalam konteks politik Sumenep yang diwarnai oleh kekuatan tradisional dan potensi politik uang, slogan ini bukan hanya seruan, melainkan manifestasi perlawanan naratif. Ia berusaha menjadi agen kontra-hegemoni yang menggeser pandangan pragmatis menuju etika pemilihan. Moh Zuhdi dan Moh Ikmal (2022) dalam studi mereka tentang politik identitas pada *tagline* kampanye Pilkada Sumenep 2020 ("Bismillah Melayani" dan "Sumenep Barokah") telah menunjukkan bagaimana calon dengan latar belakang ulama memahami budaya konstituen dalam memilih *tagline*. Hal ini menguatkan bahwa pesan-pesan kampanye di Sumenep sangat dipengaruhi oleh konteks budaya dan keagamaan. Maka, "Mele Banne Polana Pesse" dengan tegas memasuki ruang ini, mencoba menanamkan nilai moral di tengah godaan material.

Untuk mengurai kompleksitas makna dan potensi dampak dari "Mele Banne Polana Pesse," dibutuhkan kerangka analisis yang mampu menembus permukaan bahasa verbal dan menggali esensi simbolisnya. Di sinilah semiotika, sebagai cabang ilmu yang mempelajari tanda, simbol, dan maknanya dalam konteks budaya dan sosial, menjadi sangat relevan. Melalui pendekatan semiotika, khususnya dengan kerangka analisis dari Roland Barthes yang menitikberatkan pada denotasi, konotasi, dan mitos, kita dapat membongkar bagaimana slogan ini dikonstruksi sebagai sebuah tanda, dan bagaimana ia berinteraksi dengan konteks sosio-politik Sumenep.

Oleh karena itu, penelitian ini dirancang untuk melakukan eksplorasi mendalam terhadap makna semiotika dari slogan "Mele Banne Polana Pesse" dalam konteks Pilkada Sumenep 2024. Urgensi penelitian ini terletak pada kemampuannya untuk menawarkan pemahaman yang lebih kaya mengenai bagaimana pesan-pesan anti-politik uang dikomunikasikan dan dipersepsikan dalam masyarakat lokal. Lebih jauh, studi ini diharapkan dapat menelaah potensi slogan sebagai agen perubahan kesadaran politik, mengidentifikasi tantangan yang mungkin dihadapi dalam mengikis praktik politik uang, serta memberikan kontribusi teoritis pada studi komunikasi politik, semiotika, dan sosiologi politik di Indonesia, khususnya dalam memahami dinamika Pilkada di tengah upaya mewujudkan demokrasi yang lebih substansif dan berintegritas.

Meskipun slogan ini secara implisit menyerukan penolakan terhadap politik uang, kompleksitas maknanya dalam dimensi semiotika memerlukan kajian yang lebih terperinci. Dengan demikian, penelitian ini merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana makna denotatif dan konotatif slogan "Mele Banne Polana Pesse" direpresentasikan dalam kampanye Pilkada Sumenep 2024?
2. Bagaimana slogan "Mele Banne Polana Pesse" berfungsi sebagai agen semiotis dalam menantang praktik politik uang dan membentuk kesadaran kritis pemilih di Pilkada Sumenep 2024?

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk mengkaji slogan "Mele Banne Polana Pesse" dalam konteks Pilkada Sumenep 2024. Tujuannya adalah mendeskripsikan secara mendalam bagaimana slogan tersebut dikonstruksi secara semiotis dan fungsinya terkait politik uang.

Kerangka Analisis

Penelitian ini mengandalkan semiotika Roland Barthes sebagai kerangka analisis utama. Kerangka ini dipilih karena kemampuannya membongkar makna tidak hanya pada tingkat harfiah (denotasi), tetapi juga pada makna tersirat (konotasi) dan bagaimana makna tersebut membentuk ideologi atau mitos.

Analisisnya akan melalui tiga tahap:

1. Denotasi (Makna Literal): Mengidentifikasi makna harfiah dari setiap kata dalam slogan.
2. Konotasi (Makna Tersirat): Menggali asosiasi, interpretasi, dan makna budaya yang muncul di luar makna literal.

3. Mitos (Ideologi): Menganalisis bagaimana denotasi dan konotasi membentuk mitos yang lebih besar, seperti "pemilih berintegritas" atau "demokrasi bersih", yang melawan praktik politik uang.

Lokasi dan Subjek Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kabupaten Sumenep, Madura.

Subjek penelitian terdiri dari:

- Data Primer: Individu yang terlibat langsung, seperti tim kampanye, tokoh masyarakat (Kiai, Blater), serta pemilih dari berbagai latar belakang.
- Data Sekunder: Dokumen dan materi kampanye, seperti poster, spanduk, video, dan pemberitaan media lokal yang terkait dengan slogan.

Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui tiga metode utama:

- Wawancara Mendalam: Dilakukan kepada subjek primer untuk menggali pemahaman dan interpretasi mereka terhadap slogan.
- Observasi: Mengamati aktivitas kampanye dan sosialisasi slogan untuk melihat konteks penggunaannya dan reaksi masyarakat.
- Studi Dokumentasi dan Konten: Mengumpulkan dan menganalisis materi kampanye yang mengandung slogan, seperti poster dan video, untuk mendukung analisis semiotika.

Teknik Analisis Data

Data yang terkumpul akan dianalisis secara kualitatif dengan langkah-langkah berikut:

1. Reduksi Data: Memilah data yang relevan dengan analisis semiotika slogan.
2. Penyajian Data: Mengorganisasikan data dalam bentuk narasi deskriptif, kutipan wawancara, dan visual.
3. Analisis Semiotika Barthesian: Melakukan analisis secara bertahap, mulai dari identifikasi tanda, denotasi, konotasi, hingga pembongkaran mitos.
4. Penarikan Kesimpulan: Menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis untuk menjawab pertanyaan penelitian.

Keabsahan Data

Untuk menjamin keabsahan data, digunakan teknik triangulasi, yaitu:

- Triangulasi Sumber: Membandingkan informasi dari berbagai sumber (tim kampanye, tokoh masyarakat, pemilih).
- Triangulasi Metode: Menggunakan kombinasi wawancara, observasi, dan studi dokumentasi untuk memverifikasi konsistensi informasi.
- Triangulasi Teori: Menggunakan beberapa perspektif teoretis yang relevan untuk menafsirkan data, dengan semiotika Barthes sebagai fokus utama.

Kajian Teori

Penelitian ini secara spesifik menggunakan kerangka analisis semiotika Roland Barthes. Barthesian semiotics dipilih karena kemampuannya untuk membongkar tanda tidak hanya pada level permukaan (denotasi), tetapi juga pada level makna tersirat (konotasi) dan bagaimana tanda tersebut beroperasi dalam pembentukan mitos atau ideologi dalam masyarakat.

2.1. Teori Semiotika: Dari Strukturalisme ke Pos-Strukturalisme

Semiotika adalah ilmu yang mempelajari tentang tanda (semiotik) yang berarti disiplin ilmu yang mengkaji sistem tanda dan makna. Ilmu ini berkembang dari dua tokoh utama yang memiliki pandangan berbeda. Ferdinand de Saussure, seorang linguist Swiss, dianggap sebagai bapak semiotika modern. Teorinya berpusat pada hubungan biner antara penanda (signifier) dan petanda (signified) dalam sebuah tanda, yang membentuk makna secara arbitrer dan konvensional dalam sebuah sistem bahasa. Saussure menekankan bahwa makna tidak berasal dari objek itu sendiri, tetapi dari perbedaan antara tanda-tanda dalam sebuah sistem.

Di sisi lain, Charles Sanders Peirce, seorang filsuf Amerika, memiliki pandangan yang lebih kompleks dan triadik. Peirce membagi tanda menjadi tiga elemen: representamen (tanda itu sendiri), objek (referen tanda di dunia nyata), dan interpretan (efek yang ditimbulkan pada pikiran penerima tanda). Dengan demikian, semiotika Peirce lebih dinamis dan membuka ruang bagi interpretasi yang tidak terbatas.

Namun, untuk mengkaji makna dalam konteks sosial dan budaya, teori semiotika yang paling relevan adalah Roland Barthes. Barthes, seorang ahli teori sastra dan semiotikus Prancis, mengembangkan semiotika Saussurean dengan menambahkan dimensi ideologi dan mitos. Ia melihat semiotika

sebagai alat untuk "membongkar" bagaimana media dan budaya pop mengkonstruksi makna untuk mendukung ideologi dominan.

2.2. Semiotika Roland Barthes: Mitos dan Konotasi dalam Simbol Politik

Roland Barthes, seorang semiotikus dan kritikus sosial Prancis, secara fundamental memperluas semiotika Saussurean dengan menggeser fokus dari struktur bahasa yang abstrak menuju interaksi tanda dalam konteks sosial, budaya, dan politik yang konkret. Bagi Barthes, semiotika bukan sekadar alat untuk menganalisis tanda-tanda verbal, melainkan sebuah metode untuk "membongkar" bagaimana media massa, iklan, dan wacana publik mengkonstruksi makna untuk mendukung ideologi dominan, atau yang ia sebut sebagai mitos. Pandangan ini menjadi sangat relevan dalam menganalisis pesan politik, di mana simbol dan slogan tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membentuk pandangan dunia dan ideologi pemilih.

Barthesian semiotics bekerja dalam dua tingkatan makna yang saling berkaitan: denotasi dan konotasi, yang pada akhirnya membentuk mitos.

2.1.1. Denotasi: Makna Tingkat Pertama

Denotasi adalah makna literal atau harfiah dari sebuah tanda. Ini adalah makna yang paling langsung, eksplisit, dan objektif, yang dapat dipahami secara universal dalam sebuah sistem bahasa. Dalam konteks analisis semiotika Roland Barthes, denotasi merupakan "tingkat pertama" dari makna, di mana penanda (suara, gambar, teks) secara langsung menunjuk pada petanda (konsep atau objek).

Dalam penelitian ini, denotasi dari slogan "Mele Banne Polana Pesse" (Memilih Bukan Karena Uang) adalah seruan yang eksplisit dan lugas.

Makna harfiahnya sangat jelas: pemilih diminta untuk tidak mendasarkan pilihannya pada uang atau imbalan material. Slogan ini secara langsung mengacu pada praktik politik uang yang marak terjadi dalam kontestasi elektoral. Denotasi ini menjadi fondasi dari seluruh analisis, karena makna-makna selanjutnya (konotasi dan mitos) dibangun di atas pemahaman literal ini.

2.1.2. Konotasi: Makna Tingkat Kedua

Konotasi adalah makna tersirat, asosiasi, atau nilai-nilai budaya yang melekat pada sebuah tanda di atas makna denotatifnya. Konotasi bersifat subyektif dan bergantung pada konteks sosial, budaya, dan pengalaman individu. Bagi Barthes, konotasi terjadi ketika tanda pada tingkat pertama (denotasi) menjadi penanda baru untuk makna tingkat kedua yang lebih dalam dan kultural.

Slogan "Mele Banne Polana Pesse" memiliki konotasi yang kaya dan multidimensional. Slogan ini tidak hanya bermakna literal; ia juga membangkitkan asosiasi dan nilai-nilai tertentu di benak audiens. Konotasi yang mungkin muncul antara lain:

- **Integritas dan Moralitas:** Slogan ini mengkonotasikan sebuah pilihan yang didasari oleh prinsip moral, kejujuran, dan integritas pribadi. Dengan menolak uang, pemilih diasosiasikan sebagai individu yang memiliki pendirian kuat dan tidak mudah tergoda.
- **Perlawanan dan Kontra-hegemoni:** Slogan ini mengkonotasikan adanya perlawanan terhadap budaya politik uang yang telah lama mengakar dan dinormalisasi. Ia menyiratkan bahwa ada alternatif lain dalam berdemokrasi selain praktik transaksional.

- Harapan untuk Perubahan: Slogan ini juga mengkonotasikan sebuah harapan akan masa depan yang lebih baik, di mana kepemimpinan dipilih berdasarkan visi dan rekam jejak, bukan karena uang. Ini adalah ekspresi dari aspirasi masyarakat untuk praktik demokrasi yang bersih dan berintegritas.

2.1.3. Mitos: Makna Tingkat Ketiga dan Ideologi

Mitos adalah konsep sentral dalam semiotika Barthes, yang ia deskripsikan dalam karyanya *Mythologies*. Mitos adalah wacana yang mengobjektifikasi sejarah menjadi alam (naturalisasi), sehingga ideologi tertentu dianggap sebagai kebenaran alamiah atau akal sehat yang tak perlu dipertanyakan lagi. Mitos adalah konotasi yang terinstitusi, di mana makna-makna konotatif yang awalnya bersifat kultural kemudian menjadi norma sosial yang tak terucapkan, sehingga tampak alami dan universal. .

Dalam konteks Pilkada Sumenep 2024, slogan "Mele Banne Polana Pesse" beroperasi dalam sebuah arena di mana dua mitos besar saling bertentangan:

1. Mitos "Politik Uang yang Dinormalisasi": Mitos ini menganggap bahwa praktik politik uang adalah hal yang wajar, inheren, dan tidak dapat dihindari dalam setiap kontestasi politik. Mitos ini membuat praktik koruptif menjadi "alamiah" di mata sebagian masyarakat, terutama di tengah keterbatasan ekonomi. Mitos ini menjustifikasi pemilih untuk menerima uang dan membuat kandidat merasa harus memberikannya sebagai bagian dari strategi kemenangan.
2. Mitos "Pemilih Berintegritas dan Demokrasi yang Bersih": Slogan "Mele Banne Polana Pesse" berupaya menciptakan mitos tandingan ini. Slogan ini tidak hanya menyerukan penolakan terhadap politik

uang, tetapi juga berusaha membentuk identitas baru bagi pemilih sebagai individu yang berintegritas, kritis, dan berprinsip. Mitos ini mengideologikan bahwa pilihan politik yang benar adalah pilihan yang didasari oleh moralitas dan kesadaran kritis, bukan transaksionalisme.

Dengan demikian, analisis semiotika Barthes tidak berhenti pada makna slogan itu sendiri, tetapi meluas untuk memahami bagaimana slogan tersebut menjadi agen semiotis yang berupaya menggeser narasi materialistik menjadi narasi etis, menantang hegemoni mitos politik uang yang sudah mengakar di masyarakat. Penelitian ini akan mengkaji bagaimana slogan tersebut berinteraksi dengan realitas sosial-politik di Sumenep dan seberapa efektif ia dalam membentuk kesadaran kritis pemilih di tengah tantangan praktik politik uang yang persisten.

B. PEMBAHASAN

Semiotika Slogan 'Mele Banne Polana Pesse' dalam Pilkada Sumenep 2024

Dalam Pilkada Sumenep 2024, ada dua pasangan calon bupati dan wakil bupati yaitu Achmad Fauzi Wongsojudo-KH. Imam Hasyim (Faham), pasangan ini didukung oleh koalisi sepuluh partai besar yang dominan yaitu PDI Perjuangan, PKB, PAN, Demokrat, Nasdem, PKS, Gerindra, Hanura, PBB, dan Golkar, sementara pasangan K. Ali Fikri K.M. Unais Ali Hisyam (Final) hanya diusung oleh koalisi yang lebih kecil yaitu PPP dan PSI, hal ini membentuk opini publik bahwa dinamika politik dalam pilkada Sumenep 2024 menjadi sangat tidak seimbang. Pasangan Faham, dengan kekuatan

logistik dan politik yang superior, secara alami dianggap memiliki keunggulan besar.

Kondisi ini menciptakan celah bagi munculnya narasi alternatif. Slogan **"Mele Banne Polana Pesse"** muncul sebagai senjata strategis untuk melawan dominasi tersebut. Slogan ini bukan sekadar ajakan moral, melainkan sebuah **deklarasi perlawanan** terhadap potensi "politik uang" yang sering dikaitkan dengan kampanye yang didukung oleh sumber daya besar. Tak dapat dipungkiri bahwa Money Politik telah mandarah daging dan menjadi persoalan politik paling krusial sejak orde baru hingga hari ini.

Dengan slogan ini, pasangan yang lebih lemah berusaha menggeser fokus pertarungan dari adu kekuatan material menjadi adu integritas dan moralitas pemilih. Slogan ini mengajak masyarakat untuk menolak godaan politik uang dan memilih berdasarkan hati nurani, gagasan, atau rekam jejak. Secara semiotis, **"Mele Banne Polana Pesse"** adalah upaya untuk membangun mitos "pemilih yang berintegritas" dan "demokrasi yang bersih", yang secara langsung menentang mitos "politik uang yang dinormalisasi" yang mungkin muncul dari pertarungan yang timpang.

Slogan "Mele Banne Polana Pesse" (Memilih Bukan Karena Uang) adalah sebuah tanda linguistik yang kaya makna, yang beroperasi pada berbagai tingkatan semiotis dalam konteks Pilkada Sumenep 2024. Menggunakan kerangka analisis Roland Barthes, kita dapat membongkar lapisan-lapisan makna slogan ini, terutama dengan mempertimbangkan fakta bahwa gerakan ini didukung oleh para kiai dan ulama dari berbagai basis pesantren, mulai dari Guluk-guluk, Ambunten, serta daerah lain, bahkan mereka juga menggelorakan "Jaga TPS, satu kiai & satu santri". Sokongan dari tokoh

agama ini bukan sekadar endorsement politik, melainkan sebuah tindakan semiotis yang signifikan, yang mengukuhkan makna slogan dan menantang mitos yang ada.

1. Denotasi: Makna Tingkat Pertama

Secara denotatif, makna slogan ini sangat eksplisit dan lugas. Setiap kata dalam frasa "Mele Banne Polana Pesse" memiliki arti harfiah yang jelas:

- Mele: Memilih
- Banne: Bukan
- Polana: Karena
- Pesse: Uang

Ketika digabungkan, makna literalnya adalah "Memilih Bukan Karena Uang". Pada tingkat ini, slogan tersebut berfungsi sebagai seruan langsung dan gamblang kepada para pemilih untuk menolak praktik politik uang. Makna ini bersifat universal dan mudah dipahami oleh siapa pun yang mengerti bahasa Madura, menjadikannya fondasi yang kokoh untuk makna-makna selanjutnya. Denotasi ini adalah deklarasi politik yang transparan, yang secara terbuka menentang fenomena transaksional dalam demokrasi elektoral.

Kemunculan slogan seperti menyentak kesadaran bersama, terutama di kalangan pemilih pemula dan pemuda, terutama yang memahami bahwa jika pemilih memilih karena faktor uang, kemungkinan besar, mereka-mereka yang nantinya menjadi Bupati akan mengeruk Kas Daerah, uang negara untuk mengembalikan modal yang telah dikeluarkan pada saat kampanye.

“Kita tahu bersama lah, siapapun yang mengeluarkan modal besar, akan berupaya mengembalikannya. Tidak bisa dipungkiri.” Ucap salah seorang pemilih dalam satu wawancara. Kalimat ini menegaskan bahwa politik uang akan menghancurkan demokrasi sekaligus melumpuhkan moralitas berbangsa.

2. Konotasi: Makna Tingkat Kedua

Makna konotatif dari slogan "Mele Banne Polana Pesse" jauh lebih dalam dan multidimensional. Slogan ini tidak hanya menyampaikan pesan, tetapi juga membangkitkan serangkaian asosiasi budaya dan moral yang kuat. Makna konotatif ini diperkuat secara signifikan oleh dukungan dari para kiai di Sumenep.

- **Integritas dan Moralitas:** Konotasi utama dari slogan ini adalah asosiasi dengan integritas, kejujuran, dan moralitas. Slogan ini berupaya mengonstruksi identitas baru bagi pemilih sebagai individu yang berprinsip, yang tidak dapat dibeli oleh materi. Dengan menolak uang, pemilih tidak hanya membuat pilihan politik, tetapi juga menegaskan martabat dan harga dirinya sebagai warga negara.
- **Legitimasi Religius dan Moral:** Di sinilah peran para kiai menjadi krusial. Dalam masyarakat Madura yang sangat religius, kiai adalah figur otoritas moral dan spiritual. Ketika para kiai dari Guluk-Guluk hingga Ambunten menyuarakan atau mendukung slogan ini, mereka tidak hanya memberikan bobot politik, tetapi juga menyuntikkan legitimasi religius ke dalamnya. Menolak uang menjadi bukan hanya pilihan yang baik secara politik, tetapi juga pilihan yang benar secara agama (halal). Penerimaan uang politik bisa jadi diinterpretasikan sebagai tindakan yang kurang bermoral, atau bahkan haram, di

hadapan figur kiai. Konotasi ini mengubah slogan dari sekadar kampanye politik menjadi sebuah gerakan moral dan spiritual.

- **Perlawanan (Kontra-Hegemoni):** Slogan ini mengonotasikan perlawanan terhadap status quo. Di tengah budaya politik yang telah menormalisasi praktik politik uang, slogan ini menjadi simbol keberanian untuk menentang arus. Konotasi perlawanan ini semakin kuat dengan dukungan kiai, yang secara tradisional sering kali menjadi suara hati nurani masyarakat. Keterlibatan mereka mengubah pesan perlawanan menjadi sebuah gerakan massa yang memiliki dasar spiritual dan sosial.

3. Mitos: Makna Tingkat Ketiga dan Ideologi

Menurut Barthes, mitos adalah konotasi yang terlembaga dan dinaturalisasi menjadi "kebenaran alamiah" di masyarakat. Slogan "Mele Banne Polana Pesse" beroperasi dalam sebuah arena di mana dua mitos besar saling bertentangan.

- **Mitos yang Ditantang:** Slogan ini secara langsung menantang mitos yang telah mengakar bahwa politik uang adalah hal yang wajar dan tak terhindarkan dalam setiap Pilkada. Mitos ini membenarkan praktik suap sebagai bagian dari budaya politik lokal dan menjustifikasi pemilih untuk menerima uang sebagai "hak" atau "rejek". Mitos ini mengideologikan bahwa politik adalah arena transaksional, di mana suara ditukar dengan uang, dan proses ini adalah keniscayaan.
- **Mitos yang Dibangun:** Slogan "Mele Banne Polana Pesse" berupaya menciptakan mitos tandingan: "Mitos Pemilih Berintegritas" atau

"Mitos Demokrasi Bersih". Dengan dukungan kiai, mitos ini menjadi sangat kuat. Para kiai, dengan otoritas moral mereka, mengidentifikasi ulang apa itu demokrasi yang "benar" dan "bersih". Mereka mendefinisikan bahwa "demokrasi yang bersih" adalah sistem di mana pilihan didasarkan pada integritas, bukan materi. Mitos ini berusaha meyakinkan masyarakat bahwa menolak uang politik bukan hanya mungkin, tetapi juga merupakan tindakan moral yang mulia. Keterlibatan kiai memastikan bahwa mitos ini tidak hanya beresonansi pada tingkat politik, tetapi juga pada tingkat keagamaan, menggeser narasi materialistik menjadi narasi etis.

Slogan "Mele Banne Polana Pesse" adalah tanda semiotis yang sangat efektif. Kekuatannya tidak hanya terletak pada makna denotatifnya yang lugas, tetapi juga pada makna konotatif yang diperkuat secara signifikan oleh dukungan para kiai. Keterlibatan kiai dari berbagai basis pesantren di Sumenep berfungsi sebagai katalis semiotis, yang mengubah slogan dari sekadar pesan politik menjadi sebuah gerakan moral-religius yang kuat. Pada akhirnya, slogan ini berupaya menantang mitos dominan tentang normalisasi politik uang dan menggantinya dengan mitos baru tentang "pemilih berintegritas". Keberhasilan slogan ini menunjukkan bagaimana simbol politik yang berakar pada nilai-nilai lokal dapat menjadi alat yang kuat untuk menggeser ideologi dan membentuk kesadaran kritis masyarakat.

C. KESIMPULAN

Slogan kampanye "Mele Banne Polana Pesse" (Pilih Bukan Karena Uang) menjadi elemen sentral dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Sumenep 2024, merefleksikan dinamika politik lokal dan aspirasi masyarakat terhadap praktik demokrasi yang bersih. Berdasarkan analisis

semiotika Roland Barthes, slogan ini terbukti memiliki makna yang melampaui seruan anti-politik uang biasa.

Pada tingkat denotasi, slogan ini secara eksplisit menyerukan penolakan terhadap uang politik. Namun, kekuatan utamanya terletak pada tingkat konotasi, di mana slogan ini berasosiasi kuat dengan nilai-nilai integritas, moralitas, dan perlawanan. Konotasi ini diperkuat secara signifikan oleh dukungan para kiai dan ulama dari berbagai basis pesantren di Sumenep. Keterlibatan mereka berfungsi sebagai katalis semiotis yang menggeser slogan dari sekadar pesan politik menjadi sebuah gerakan moral-religius.

Pada akhirnya, slogan ini berupaya menantang mitos dominan yang telah menormalisasi praktik politik uang, dan menggantinya dengan mitos tandingan tentang "pemilih berintegritas" dan "demokrasi yang bersih". Keberhasilan slogan ini menunjukkan bagaimana simbol politik yang berakar pada nilai-nilai lokal, terutama yang disokong oleh otoritas moral dan spiritual seperti kiai, dapat menjadi alat yang ampuh untuk menggeser ideologi dan membentuk kesadaran kritis masyarakat terhadap isu-isu krusial. Temuan ini berkontribusi pada pemahaman komunikasi politik lokal dan peran semiotika dalam membentuk kesadaran kritis masyarakat.

Daftar Pustaka

Akbar, Idil. 2015. "Pilkada Serentak dan Geliat Dinamika Politik dan Pemerintahan Lokal Indonesia." *Jurnal Ilmu Pemerintahan*.

Arifulloh, Achmad. 2020. "Pelaksanaan Pilkada Serentak yang Demokratis, Damai dan Bermartabat." *Jurnal Yuridis*, Vol. 7 No. 1, Januari 2020.

Faqi, Ahmad Fachri, Muh. Hasrul, Amaliyah Amaliyah, Ismail Iskandar, dan M. Aris Munandar. 2023. "Student Perceptions as Beginner Voters against the Normalization of Money Politics in General Elections." *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, Vol 9, No. 1, 2023, pp. 17-30.

Faqthuri. 2020. "Politik Uang dan Uang Politik." [Online]. Tersedia: <http://www.gpansor.org/opini/politik-uangdan-uang> politik.html. Diakses pada tanggal 13 Juni 2020 pukul 12.15 WIB.

Fauzan, Ahmad Fathoni. 2018. *Tipologi Masyarakat Desa Ambunten Timur Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep Pada Pilkada Serentak 2015*. Skripsi. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Ghafar, Abdul. 2008. *Uang dan Politikus*. Yogya: Penyebar Demokrasi.

Kosim, Mohammad. 2007. "Kyai dan Blater (Elite Lokal dalam Masyarakat Madura)." *KARSA*, Vol. XII No. 2 Oktober 2007, 166.

Kuntag, Romario Christian Falco, Toar N. Palilingan, dan Dicky J. Paseki. 2022. "Upaya Pengawas Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum) dalam Memberantas Politik Uang (Money Politic) di Kota Manado."

Lampus, Christy Messy, Marlien T. Lopian, dan Efvendi Sondakh. 2022. "Fenomena Politik Uang dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 di Kecamatan Wanea." *EKSEKUTIF*, Volume 2 No. 3 Tahun 2022.

Nail, Muhammad Hoiru. 2018. "Kualifikasi Politik Uang dan Strategi Hukum dan Kultural Atas Pencegahan Politik Uang dalam Pemilihan Umum." *Jurnal Yuridis*, Vol. 5 No. 2, Desember 2018: 245-261.

Prasetyo, Mujiono Hafidh. 2020. "Kejahatan Politik Uang (Money Politics) Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Terhadap Konstruksi Pemerintahan." *Administrative Law & Governance Journal*, Volume 3 Issue 3, September 2020.

Raditya, Ardhie. 2011. "Politik Keamanan Jagoan Madura." *Jurnal Global & Strategis*, Vol 5, No 1.

Rohmatin, Ainur. 2016. "Relasi Informal dan Formal Politik PKB dalam Penjaringan Calon Bupati Sumenep Tahun 2015." *Jurnal Politik Muda*, Vol. 5, No. 2, April - Juli 2016, 233-246.

Rozaki, Abdur. 2004. *Menabur Kharisma Menuai Kuasa: Kiprah Kiai dan Blater sebagai Rezim Kembar di Madura*. Yogyakarta: Pustaka Marwa Publisher.

Sirozi, El-Manaf. 2008. *Politik Uang dan Gerakan Pemelamahan Demokrasi*. Surabaya: Cahyapres.

Syarif, Zainuddin. 2014. "Pergeseran Perilaku Politik Kiai dan Santri di Pamekasan Madura." *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*.

Zuhdi, Moh., dan Moh Ikmal. 2022. "Identity Politics in The Campaign Tagline at The 2020 Sumenep Elections." *Jurnal Mediakita*, Vol. 6, No. 2, pp. 147-158.